

No. 147 April - Mei 2018

BaKTI**News**

www.bakti.or.id

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

- **MENGGERUS SEKAT ANTARA GURU DAN ORANG TUA**
- **MELINDUNGI ANAK MELALUI PENCATATAN KELAHIRAN**
- **PASIKOLA, BUKAN SEKEDAR ANGKUTAN ANTAR JEMPUT ANAK SEKOLAH**
- **RESES PARTISIPATIF DI MAROS**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771979 777057



BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.bakti.or.id

Editor **M. YUSRAN LAITUPA**
ZUSANNA GOSAL
VICTORIA NGANTUNG
ITA MASITA IBNU

Events at BaKTI **SHERLY HEUMASSE**

Smart Practices
& Info Book **SUMARNI ARIANTO**

Database
Kontak **INDINA ISBACH**

Design & layout
Editor Foto **FRANS GOSALI**

Redaksi

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146

Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id SMS BaKTINews** 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201**

Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter @InfoBaKTI

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.

BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.

BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua).

Panjang artikel adalah 1.000 - 1100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia maupun Inggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

BaKTI**News** accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.

Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTI**News** will edit every article for reasons of space and style. BaKTI**News** does not provide payment to writers for articles.

MENJADI PELANGGAN BaKTI**News** Subscribing to BaKTI**News**

Untuk berlangganan BaKTI**News**, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email baktinews@bakti.or.id.

Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTI**News** di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

To subscribe to BaKTI**News** please send us your full contacts details (including organization, position, HP number and email address) with full postal address to baktinews@bakti.or.id.

For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

Daftar Isi

BaKTI*News*

April - Mei 2018

No. **147**

- 1** Pengawas Siap Ambil Alih
Oleh **GHUFRON AHMAD**
- 5** Menggerus Sekat antara Guru dan Orang Tua
Oleh **MUHAMMAD ZAMRUD AL FIRDAUS**
- 7** Bojonegoro Berbagi Pengalaman Penyelenggaraan Layanan Dasar
- 11** Daerah Mana yang Paling Banyak mendapat Dana Desa ?
Oleh **SCHOLASTICA GERINTYA**
- 15** Manokwari Selatan Replikasi Sistem Administrasi dan Informasi Kampung
Oleh **N. J. TANGKEPAYUNG**
- 17** Pelatihan Manajemen Puskesmas Provinsi Papua
Oleh **N. J. TANGKEPAYUNG**
- 19** Dokter di Pulau :
Pusling ke Cio Dalam
Oleh **RIZKY WAKANO**
- 23** Orang-orang Nusantara di Negeri Seribu Bakau
- 27** Pasikola, Bukan Sekedar Angkutan Antar Jemput Anak Sekolah
Oleh **MANSYUR RAHIM**
- 31** Melindungi Anak Melalui Pencatatan Kelahiran
Oleh **HAMSAH SINRING**
- 35** Reses Partisipatif di Maros
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**
- 39** Update Batukarinfo
- 40** Kegiatan di BaKTI
- 41** Info Buku

Foto Cover : Silvania Mandari/Yayasan BaKTI



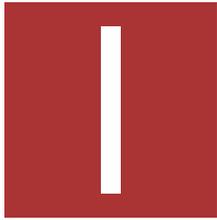
Foto : Dok. Yayasan BAKTI

Pengawas Siap Ambil Alih

Oleh **GHUFRON AHMAD**



Segala upaya telah dilakukan oleh semua pihak sebagai wujud pengabdian yang terbaik demi meningkatnya kualitas layanan pendidikan.



Implementasi program Rintisan KIAT Guru di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat yang dimulai bulan Oktober 2016 akan segera berakhir di Juni 2018.

Tentunya telah menjadi harapan semua pihak agar program ini bisa direplikasi ke semua Sekolah Dasar di Kabupaten Ketapang yang mempunyai karakter yang sama dengan sekolah rintisan program KIAT Guru, sehingga Dinas Pendidikan berinisiatif untuk memperkuat jaringan pengawasnya agar implementasi program ini dapat berjalan dengan baik setelah bulan Juni 2018. Tata kelola penilaian tahun 2018, peran pengawas sebagai ujung tombak di tingkat kecamatan pasca Unit Pengelola Pendidikan tingkat Kecamatan (UPPK) dibubarkan.

Pengawas nantinya akan berperan sebagai Koordinator Kecamatan yang beranggotakan semua pengawas dan 1 orang koordinator pengawas.

“Tim Ketapang yang berjumlah 13 orang terdiri dari Koordinator Lapangan (KL), Asisten Administrasi dan keuangan (AAK), Pelaksana Lapangan (PL), Fasilitator Masyarakat (FM) akan ditarik dari Kabupaten Ketapang, maka diperlukan penguatan kapasitas untuk pengawas SD dan SMP demi keberlanjutan program KIAT Guru di wilayah kami, walaupun kelak tipenya diganti lebih sederhana, misalnya kalau selama ada tim pakai mekanisme tipe 75, maka kelak kami pakai tipe 35 (Tipe 75 dan 35 adalah indikator janji layanan)” tutur Dr. Ucup Supriatna, M.Pd selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.

Tanggal 13 – 16 Februari 2018 Tim Ketapang bersama Dinas Pendidikan Kabupaten



Foto : Dok. Yayasan BaKTI

Ketapang melakukan pelatihan aplikasi KIAT Nilai dan proses verifikasi yang diikuti oleh 15 pengawas dari 8 Kecamatan yang menjadi program rintisan KIAT Guru dan 8 pengawas SMP, kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Dinas Pendidikan didampingi oleh Koordinator Pengawas, dengan narasumber dari Tim KIAT Guru dan Bapak Syarifudin Pranoto Negoro dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Kegiatan ini sekaligus wujud komitmen Dinas Pendidikan dan tindak lanjut hasil kunjungan tanggal 1-2 Februari 2018 di saat proses penilaian rutin bulanan di sekolah/desa rintisan program KIAT Guru.

Dalam pelatihan ini, pengawas belajar aplikasi KIAT Nilai mulai dari menginstall aplikasi KIAT Nilai versi 3.2 di laptop masing-masing sampai proses penginputan data dari sekolah binaan masing-masing. Berikut ini beberapa rekomendasi Dinas Pendidikan dan

poin-poin rencana kerja pengawas disesuaikan dengan konteks tata kelola untuk wilayah KabupatenKetapang.

Segala upaya telah dilakukan oleh semua pihak, sebagai wujud kontribusi pengabdian yang terbaik demi meningkatkan kualitas layanan pendidikan, agar anak-anak mendapatkan hak yang sama seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Dengan asas gotong royong dan kebersamaan semua pihak akan membawa anak-anak kita menuju generasi Indonesia yang lebih baik” Salam Perjuangan. ●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah staf Pelaksana Lapangan KIAT Guru Kabupaten Ketapang. Dapat dihubungi via email ghufronahmad81@gmail.com

Rekomendasi untuk Dinas Pendidikan :

- 1 Posisi pengawas di kecamatan perlu diperkuat untuk menggantikan Tim KIAT Guru yang selama ini menjadi fasilitator program, terutama berkaitan proses pelaksanaan penilaian bulanan di desa.
- 2 Proses verifikasi KIAT Nilai triwulanan di kabupaten akan melibatkan koordinator pengawas, pengawas SD dan pengawas SMP yang ada di Dinas Pendidikan.
- 3 Verifikasi bulanan yang sebelumnya dilakukan UPPK akan dilakukan oleh pengawas di masing-masing kecamatan tiap bulan di tanggal 7 dan tingkat kabupaten secara triwulanan.
- 4 Dokumen penilaian yang diserahkan ke pengawas tiap bulannya berupa dokumen Formulir Layanan Guru (FLG), Formulir Penilaian FPKG Kepala Sekolah, Rekapitulasi FLG, Rekapitulasi FPKG, Surat Persetujuan Kepala Sekolah dan Kepala Desa yang sudah ditanda tangani dan cap basah oleh kedua belah pihak.

Poin-poin rencana kerja pengawas dan harapan pengawas

- 1 Pengawas kecamatan akan mengikuti proses penilaian bulanan di desa.
- 2 Pengawas kecamatan akan membawa dan mengumpulkan berkas dokumen penilaian bulanan dari tiap sekolah dilingkungannya setiap tanggal 5 setiap bulannya.
- 3 Verifikasi bulanan dilaksanakan oleh pengawas di kecamatan masing-masing di setiap tanggal 7 setiap bulannya.
- 4 Pengawas hadir di proses verifikasi triwulanan di kabupaten.
- 5 Perlu memperhatikan operasional pengawas agar dapat melakukan tugasnya secara maksimal untuk sekolah binaannya.

Menggerus Sekat antara Guru dan Orang Tua



Oleh **MUHAMMAD ZAMRUD AL FIRDAUS**

S

ore itu adalah pertemuan perubahan janji layanan guru SDN 19 Kendawangan dan masyarakat dusun Pangkalan Pinang Desa Sungai Jelayan, Kecamatan

Kendawangan Kabupaten Ketapang. Setelah hampir enam bulan masing-masing pihak, sekolah dan masyarakat mencoba melaksanakan kesepakatan layanan untuk anak-anak di desa yang telah mereka sepakati bersama, tibalah waktu dimana para pihak



Foto : Zamrud Al Firdaus / Yayasan BaKTI

Proses diskusi yang dilakukan pihak sekolah dan orang tua murid dalam suasana yang harmonis, memperlihatkan tidak ada sekat yang menghalangi komunikasi antara orang tua dan guru untuk masa depan anak.

saling mengevaluasi layanan pada pertemuan a m a n d e m e n a t a u perubahan janji tersebut. Diskusi yang digelar di ruang kelas berjalan lancar, pihak guru dan orang tua terlihat akrab berbincang-bincang di awal kegiatan. Ditemani kue kukus dan segelas kopi dan teh, mereka bercengkrama seperti sudah lama tidak bertemu dan mengobrol. Melihat suasana demikian tampak jauh berbeda jika dibandingkan dengan pertemuan menyepakati

janji layanan awal yang cenderung saling menyalahkan dan merasa benar sendiri.

“Dulu kami tidak ada komunikasi dengan sekolah, jadi tidak tahu kegiatan di sekolah untuk anak-anak kami apa, bawaannya curiga terhadap guru. Sekarang setelah ada kesepakatan bersama, guru lebih perhatian dan berkomunikasi ke kami” ujar Wiwin salah satu orang tua murid.

Alhasil saling curiga kini perlahan hilang, begitupun rasa canggung ketika bertanya atau berdiskusi dengan guru di kehidupan sehari-harinya. Begitupun sebaliknya, guru mulai terbuka berdiskusi dan menerima saran dan

masukannya dari masyarakat untuk peningkatan pendidikan.

Pemandangan lain yang juga menjadi simbol sekaligus contoh teladan baik bagi guru dan masyarakat adalah di saat pertemuan perubahan janji layanan, kepala sekolah tidak merasa dihakimi dan defensif, merangkul orang tua murid yang tidak bisa membaca sambil menjelaskan maksud janji layanan pelan-pelan satu per satu. Senyum riang terlihat di bibir orang tua murid yang di hampir seluruh rangkaian pertemuan dari awal sampai di pertemuan ini tidak pernah bersuara dan mengeluarkan pendapatnya, mungkin saja karena segan atau malu karena ketidakmampuannya membaca. Rona bahagia tampak jelas di raut mukanya seperti tidak pernah menyangka diperlakukan seperti itu oleh kepala sekolah. Ini seperti memberi pesan bahwa sekat antara guru selalu dianggap lebih tahu segalanya, mempunyai kedudukan tinggi di masyarakat desa digerus pelan-pelan dengan cara penyampaian yang tidak menggurui, tidak menghardik tetapi bisa lebih bermakna dan membekas melalui cara lembut seperti yang dicontohkan kepala sekolah bahwa tidak ada tembok tinggi yang menghalangi hubungan komunikasi antara orang tua dan guru untuk masa depan anak.

Teladan keharmonisan kepala sekolah dan masyarakat khususnya orang tua seperti ini diharapkan bisa menjadi kunci awal keberhasilan anak yang menular kepada baik guru dan orang tua di sekolah dan desa ini maupun di daerah lain negeri ini. ●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Fasilitator Masyarakat KIAT Guru Kabupaten Ketapang
Dapat dihubungi melalui email zamrudalfirdaus@gmail.com

Bojonegoro Berbagi Pengalaman Penyelenggaraan Layanan Dasar

“Tidak ada kabupaten miskin. Yang ada daerah yang salah urus. Mari kita penuhi kebutuhan saat ini dan siapkan generasi Bojonegoro masa depan”

Kang Yoto
Bupati Bojonegoro



Perbaikan layanan dasar di Indonesia, terutama untuk kelompok miskin dan rentan, masih menjadi pekerjaan rumah yang tersisa bagi pemerintah Indonesia. Ditengah

laju pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil sejak awal dekade 2000-an, yang membawa Indonesia menjadi anggota kelompok G-20 yang merupakan 20 negara dengan perekonomian terbesar di dunia, beberapa indikator penyelenggaraan layanan dasar kita, seperti angka kematian ibu melahirkan, dan angka balita pendek (*stunting*), masih berada di bawah tingkatan yang seharusnya dapat dicapai Indonesia.

Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi salah satu kunci upaya perbaikan layanan dasar, karena setelah dilaksanakannya desentralisasi sehingga merekalah yang menjadi penyelenggara utama layanan dasar di tingkat daerah. Menyadari hal tersebut, semenjak bulan Oktober 2017 yang lalu, Bank Dunia bersama Yayasan BaKTI menggandeng 3 Kabupaten yang memiliki komitmen tinggi untuk perbaikan layanan dasar, yaitu: Bojonegoro, Kubu Raya, dan Belu, untuk melakukan inisiatif bersama menguraikan permasalahan dalam perbaikan layanan dasar di daerah-daerah tersebut, singkatnya inisiatif ini disebut dengan MELAYANI. Diharapkan dari inisiatif bersama tersebut diperoleh berbagai model-model penguraian masalah perbaikan layanan dasar di Indonesia.

Setelah 4 bulan inisiatif ini berjalan, 3 Kabupaten partisipan sepakat untuk melakukan tukar pengalaman dan menarik pelajaran dari penyelenggaraan layanan dasar di masing-masing daerah. Sebagai tuan rumah pertama proses tukar pengalaman ini adalah Kabupaten Bojonegoro. Dalam pertemuan tukar pengalaman yang diselenggarakan tanggal 12-13 Februari 2018 yang lalu, dipimpin langsung oleh Bupati Bojonegoro Dr. Suyoto atau biasa dipanggil Kang Yoto. Sementara delegasi dari Kabupaten Belu NTT dipimpin langsung oleh Bupati Willy Lay, didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Marsianus. Sedangkan dari Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan, dr. H. Berli, didampingi oleh Kepala Bidang Sosial



Kunjungan Tim Kubu Raya, Belu dan MELAYANI ke Puskesmas Wisma Indah untuk melihat penyelenggaraan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. (Foto: Afrizal / Yayasan BaKTI)

Budaya BAPPEDA, Faisal Hadi Djaya. Selain itu hadir pula perwakilan dari Bank Dunia selaku mitra internasional dalam pelaksanaan program MELAYANI serta para pendamping (*Coach*) program MELAYANI di tiap kabupaten wilayah kerja MELAYANI.

Bojonegoro terpilih sebagai tuan rumah tukar pengalaman mengingat pengalaman Bojonegoro dalam melakukan beberapa program inovasi perbaikan pelayanan dasar.

Kabupaten Bojonegoro terpilih mewakili Indonesia dan Asia sebagai daerah percontohan pada *Open Government Partnership (OGP) Subnational Government Pilot Program* atau Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka di tahun 2016. Bojonegoro bersama kota Seoul, Korea Selatan, dan Tbilisi di Georgia. Keterbukaan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tercermin antara lain dari publikasi informasi keuangan daerah yang sangat transparan di website pemerintah daerah,

bahkan masyarakat bisa menjumpai nama-nama penerima pembayaran dari anggaran pemerintah daerah.

Salah satu terobosan penting yang dilakukan adalah, membuka Dialog Publik, sebuah forum transparansi kinerja pejabat yang dilaksanakan tiap hari Jumat untuk belajar mencari solusi bersama. Selama 10 tahun masa pemerintahannya, Kang Yoto nyaris tidak pernah absen dalam pertemuan jumat siang tersebut. Selain itu, teknologi informasi dan media sosial dimaksimalkan untuk mendorong pemerintah yang terbuka.

Proses panjang telah dilalui, untuk mewujudkan pemerintahan terbuka, secara tepat, cepat dan bermanfaat. Dialog Publik adalah hal yang paling sederhana dalam proses keterbukaan, membuka akses informasi yang bisa menyampaikan uneg-uneg masyarakat langsung kepada bupati, dan pejabat daerah lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi,



merupakan bagian untuk menguatkan akses informasi, memahami dan memberikan solusi berbagai persoalan di masyarakat.

Hal lain yang menarik dari Bojonegoro adalah bagaimana memanfaatkan kolaborasi empat sekawan. Keterlibatan Akademisi, *Business*/Pengusaha, *Government and Community* (ABGC), dalam perumusan berbagai kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). “Kami sangat terbuka untuk melakukan kolaborasi dengan pengusaha, LSM dan Lembaga Donor, semakin banyak yang memikirkan masalah Bojonegoro, semakin baik” demikian kata Kang Yoto.

Wujud kolaborasi empat sekawan dapat dilihat dalam berbagai program pembangunan seperti: Bojonegoro berkolaborasi dengan World Bank untuk melakukan *review* terhadap persoalan penurunan angka kematian ibu dan menaikkan angka partisipasi sekolah, penyiapan data dasar indikator layanan tingkat desa yang dilakukan oleh ibu-ibu dasawisma dan konversinya dari manual ke digital bekerja sama dengan Mediatrix, sebuah perusahaan konsultasi swasta, dan didukung oleh Bojonegoro Institute. Pemantapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDG's

berbasis keterbukaan pemerintahan atau *Open Government Partnership* (OGP) didukung oleh INFID dan IDFoS. Persiapan pembentukan dana abadi Migas didukung oleh Bank Dunia dan NRG. Perbaikan data Basis Data Terpadu (BDT)/Kemiskinan didukung oleh Bojonegoro Institute & PWYP. Untuk persiapan lapangan kerja terkait ekonomi, pertanian dan industri kreatif didukung sepenuhnya oleh beberapa universitas seperti Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Indonesia, Universitas Airlangga dan Pusat Pemberdayaan Komunitas Perkotaan Universitas Surabaya (Pusdakota Ubaya). Inisiatif Kabupaten Ramah HAM langsung bekerjasama dengan Komnas HAM dan Universitas Bojonegoro.

Di sektor swasta, analisis tanah dan pemupukan bekerjasama dengan Petrokimia Gresik, pengelolaan sayur dan buah yang dibentuk menjadi tempat wisata, bekerjasama dengan PT. Agroguna, serta peningkatan olahan sarang burung menjadi produk minuman sehat yang menjadi komoditi ekspor bekerjasama dengan PT. Realfood.

Pemkab Bojonegoro memanfaatkan berbagai saluran komunikasi dan informasi untuk



KIRI : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya saat menyampaikan tanggapan pada proses berbagi pengalaman bersama RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo.

KANAN : Kang Yoto (Bupati Bojonegoro) dan Willy Lay (Bupati Belu) saat mengikuti Pertemuan MELAYANI di Aula Kantor Bupati Bojonegoro.

(Foto: Afrizal / Yayasan BaKTI)

berkomunikasi dengan masyarakat. Sejak Juli 2014, Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) mengembangkan sistem komunikasi dengan masyarakat secara digital yang disebut Sistem Integrasi Aspirasi Publik (SIAP) dengan Layanan Aspirasi Online Rakyat (LAPOR!) dengan website www.lapor.go.id yang mengadopsi model layanan komunikasi dan aduan yang diterapkan oleh pemerintah pusat namun kemudian dikembangkan agar lebih mudah menjangkau masyarakat secara luas. Kecanggihan aplikasi ini tidak hanya menjadi ornamen saja, tapi ditindaklanjuti, bahkan penyelesaian aduan salah satu indikator kinerja yang dibahas dalam rapat *management review* setiap hari Jumat pagi.

Hal menarik lainnya adalah koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah strategis layanan dasar melalui optimalisasi fungsi Staf Ahli Bupati dalam melakukan analisa sesuai dengan bidangnya masing-masing sampai menyusun konsep akademis untuk melahirkan suatu kebijakan. Selain staf ahli, Bojonegoro juga mengoptimalkan fungsi para asisten sebagai “Menteri Koordinator” yaitu mengkoordinasikan Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga dalam pelaksanaan koordinasi lebih mudah dan efektif. Sehingga tugas bupati lebih ringan ketika jabatan-jabatan itu difungsikan sesuai aturan yang berlaku.

Salah satu buah manis dari berbagai terobosan itu adalah keluarnya Bojonegoro dari daftar 10 besar kabupaten/kota termiskin di Jawa Timur. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, menurut data terakhir yang tersedia dari BPS tahun 2016 persentase penduduk miskin di Bojonegoro adalah 14,6%, turun dari 15,71% di tahun 2015.

Kunjungan dua hari pemerintah Kubu Raya dan Belu di Kabupaten Bojonegoro diharapkan mampu memberikan banyak informasi dan pengalaman baru yang dapat menginspirasi masing-masing pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan khususnya terkait pelayanan dasar.

Terbangunnya keeratan dan kekuatan kepercayaan antara pemerintah dan rakyat dalam berbagai elemen, merupakan pengikatnya. Saling percaya tidak hanya secara individual, harus terdorong sebagai institusional dan terimplementasikan sebagai kultural untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. ●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mengetahui tentang Program MELAYANI dapat menghubungi info@bakti.or.id

Daerah Mana yang Paling Banyak Mendapat Dana Desa ?

Oleh **SCHOLASTICA GERINTYA**

Anggaran dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun. Sayangnya, penggunaan dananya juga rawan untuk diselewengkan



Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di daerah Pamekasan, Jawa Timur yang berhasil menangkap

Achmad Syafii, Bupati Kabupaten Pamekasan. OTT ini dilakukan terkait penggelapan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pamekasan tahun Anggaran 2015 – 2016.

Kasus penyimpangan dana desa bukan yang pertama kali terjadi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi (Kemendesa PDTT) telah menerima 932 pengaduan mengenai penyimpangan penggunaan dana ini.

Dana desa pada dasarnya diberikan oleh pemerintah pusat untuk pemerataan pembangunan antara desa dan kota sehingga tidak muncul kesenjangan. Untuk itu, diterbitkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Melalui UU ini, pemerintah desa memiliki kewenangan yang lebih besar untuk melakukan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan keuangan desa dalam rangka pembangunan di desa.

Pembagian Dana Desa dilakukan berdasarkan Alokasi Dasar sebesar 90% dan 10% sisanya masuk dalam alokasi formula.

Melalui UU Dana Desa, pemerintah desa memiliki kewenangan lebih besar mengelola keuangan. Selama tiga tahun pelaksanaan, anggaran Dana Desa terbesar masih terpusat di Pulau Jawa.

Alokasi dasar merupakan unsur pemerataan pembangunan Desa dan Kota. Sedangkan, alokasi formula merupakan representasi unsur keadilan, di mana dalam menentukan nilainya digunakan pembobotan, yaitu 25% untuk jumlah penduduk, 35% untuk angka kemiskinan, 10% untuk luas wilayah, dan 30% untuk tingkat kesulitan geografis desa.

Formulasi ini dilakukan berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 dan terakhir kali dengan PP Nomor 8 Tahun 2016. Selanjutnya, secara teknis, pengalokasian Dana Desa diatur dalam PMK Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Seperti dalam dasar penerbitan peraturannya, penggunaan dana desa ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Selain itu, dana desa juga digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Prioritasnya adalah untuk pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Tahun 2015 merupakan tahun pertama dialokasikannya Dana Desa pada APBN. Realisasi Dana Desa sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 20.766,2 miliar dan realisasinya sebesar 100% dari pagu pada APBN-P yang ditetapkan di 2015.

Anggaran Dana Desa terbesar berada di pulau Jawa dengan nilai Rp 6.513,21 miliar atau setara dengan 31,36% dari total dana desa. Dengan jumlah desa pada 2015 di Pulau Jawa yang



Ilustrasi : Frans Gosali

Pembagian Dana Desa



Alokasi Dasar 90 %

25 % : Jumlah Penduduk

35 % : Angka Kemiskinan

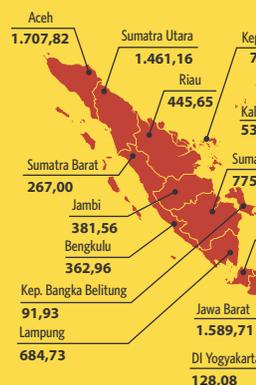
10 % : Luas Wilayah

30 % : Geografis Desa

- Alokasi Dasar
- Alokasi Formula

Sumber : PP No. 60 Tahun 2014, PP No. 22 Tahun 2015, PP No.8 Tahun 2016

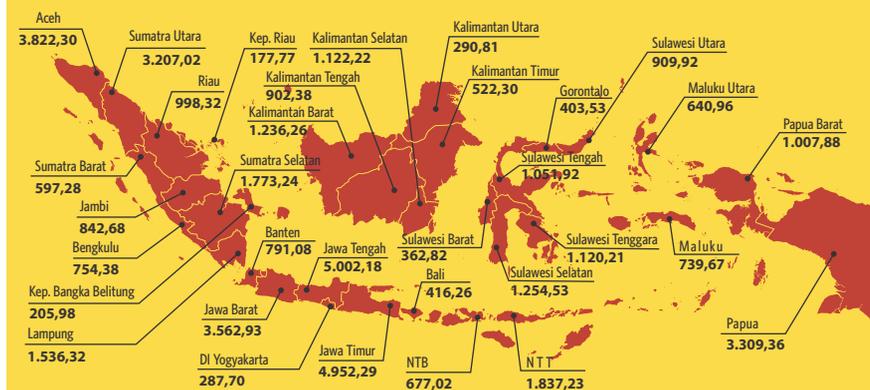
Peta Sebaran Realisasi Dana Desa (Dalam Miliar Rupiah)



Peta Sebaran Realisasi Dana Desa Per Provinsi 2016 (Dalam Miliar Rupiah)



Peta Sebaran Realisasi Dana Desa (Dalam Miliar Rupiah)



Sumber : Kementerian Keuangan

terhitung sebanyak 25.011, maka rata-rata setiap desa mendapatkan dana sebesar Rp 260,41 juta. Sedangkan, Bali dan Nusa Tenggara merupakan wilayah yang mendapatkan alokasi dana desa terkecil dengan nilai Rp 1.300,01 miliar atau setara dengan 6,26%. Rata-rata, dengan jumlah desa di Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 5.127, maka pada 2015, setiap desa mendapatkan dana sebesar Rp 253,56 juta.

Untuk daerah timur Indonesia, alokasi dana desa sebesar Rp 2.507,63 miliar atau sebesar 12,08% terhadap total dana desa. Dengan

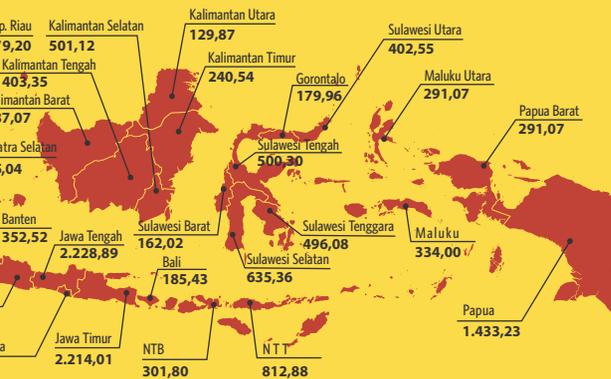
jumlah desa yang berada di wilayah ini pada 2015 sebanyak 8.479 desa, maka rata-rata per desa mendapatkan dana sebesar Rp 295,75 juta.

Pada 2016, realisasi Dana Desa adalah sebesar Rp 46.679,3 miliar atau 99,36% dari jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2016 sebesar Rp 46.982,1 miliar. Dibandingkan 2015, realisasi Dana Desa 2016 meningkat sebesar 123,04%.

Pertumbuhan realisasi dana desa terbesar berada di wilayah Maluku dan Papua yang meningkat sebesar 127,22% dibandingkan

Realisasi Dana Desa Per Provinsi 2015

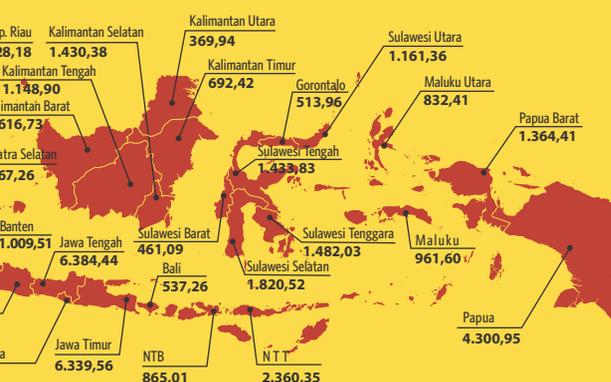
(Miliar)



Sumber : Kementerian Keuangan

Realisasi Dana Desa Per Provinsi 2017

(Miliar)



Sumber : Kementerian Keuangan

tahun sebelumnya. Pada 2016, dana desa yang disalurkan ke wilayah timur Indonesia ini sebesar Rp 5.697,88 miliar. Dengan jumlah desa sebanyak 8.832 desa, maka rata-rata dana yang diterima per desa adalah Rp 645,14 juta.

Sedangkan, pertumbuhan realisasi dana desa terendah berada di wilayah Sulawesi dengan hanya tumbuh sebesar 114,75%. Realisasi dana desa yang disalurkan untuk wilayah ini pada 2016 sebesar Rp 5.102,93 miliar. Untuk realisasi dana yang diterima per desa, rata-rata sebesar Rp 483,55 juta pada 2016.

Pada 2017, dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah sebesar Rp 60 triliun atau meningkat sebesar 27% dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Melihat persebarannya, anggaran untuk dana desa terbesar tetap di pulau Jawa dengan nilai Rp 18.649,59 miliar, menyusul berikutnya adalah Sumatera sebesar 17.997,27 miliar rupiah. Kenaikan anggaran terbesar ada pada Sulawesi dan Maluku sebesar 34,09% dan Papua sebesar 31,23% dari tahun sebelumnya.

Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, terlihat anggaran Dana Desa terus mengalami peningkatan. Peningkatan anggaran dan realisasi ini sesuai dengan arah kebijakan pemerintah berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU tersebut disebutkan pemerintah secara bertahap akan meningkatkan alokasi dana desa dan pada 2017 ditargetkan alokasi Dana Desa mencapai 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Peningkatan dana desa ini juga menjadi indikasi komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan desentralisasi di Indonesia.

Namun, selain proporsinya yang masih terpusat di Pulau Jawa, dana desa juga rawan diselewengkan. Berdasarkan hasil kajian yang lakukan *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, fenomena korupsi di daerah semakin luas setelah pemerintah pusat mengimplementasikan alokasi dana desa. Berdasarkan laporan ICW tersebut, pada 2016, dana desa masuk dalam lima besar sektor yang dikorupsi.

Meskipun komitmen pemerintah terlihat besar untuk mengurangi ketimpangan kesejahteraan, khususnya antara masyarakat desa dan kota, akan tetapi penyelewengan tak dapat dihindari. Hal ini tak lepas dari rendahnya pengawasan mulai dari alokasi, penyaluran hingga pemanfaatan dana desa. Pemerintah Pusat sudah harus memperhatikan tata kelola mulai dari satuan terkecil, mulai dari peningkatan kompetensi kepala desa hingga kemampuan pengawasan masyarakatnya. ●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Tulisan ini bersumber dari laman tirto.id dan dapat dibaca pada tautan www.tirto.id/daerah-mana-yang-paling-banyak-mendapat-dana-desa-cudi



Manokwari Selatan Replikasi Sistem Administrasi dan Informasi Kampung

Oleh **N. J. TANGKEPAYUNG**

M

enggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan mengadakan Pelatihan Sistem Administrasi dan

Informasi Kampung (SAIK) untuk Distrik Neney, Tahota dan Dataran Isim di Ransiki ibukota Kabupaten Manokwari Selatan.

Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari mulai 19-21 Februari 2018 ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas Kepala Kampung, Sekretaris Kampung dan aparat kampung dalam Penyusunan SAIK. Secara khusus pelatihan ini menitikberatkan pada pengenalan

profil kampung berbasis data dan pengenalan SAIK berbasis Website Desa.

Berbeda dengan Distrik Oransbari, Ransiki dan Momiwaren yang telah lebih dahulu mengembangkan SAIK dengan dukungan Program KOMPAK LANDASAN 2, pelatihan dan pengembangan SAIK di kampung-kampung dari Distrik Neney, Tahota dan Dataran Isim sepenuhnya didanai oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Dengan demikian Kabupaten Manokwari Selatan dan seluruh kampungnya memiliki sistem data kampung berupa SAIK.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Manokwari Selatan, Pit Mandacan, S.Sos dalam sambutannya mewakili



Foto : N.J. Tangkepayung/Yayasan BaKTI



Bupati Manokwari Selatan berharap peserta pelatihan akan mengikuti pelatihan dengan baik yang pada akhirnya akan menguasai aplikasi SAIK dan mampu melakukan pendataan serta melakukan perencanaan pembangunan kampungnya secara bersama dalam Musrenbang kampung yang berdasarkan data yang akurat.

Pada kesempatan ini juga, Tim KOMPAK LANDASAN 2 mengunjungi Kantor Distrik Momiwaren untuk memberikan dukungan dan pendampingan dalam rangka persiapan pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Distrik (SAID) Momiwaren. Di ruang kerja Kepala Distrik Momiwaren, Fredik Ainusi, SE, Implementing Manager LANDASAN 2, George Corputty menjelaskan langkah-langkah

menuju SAID dan apa yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah distrik hingga pada proses peluncurannya.

Pelatihan diikuti oleh 52 orang kader dan aparat kampung dari 22 kampung di Distrik Neney, Tahota dan Dataran Isim Kabupaten Manokwari Selatan. Sebagai fasilitator dan pelatih adalah Tim Mitra Turatea (Abdul Rakhmad, Victor Maripadang dan M Firman) dibantu oleh Tiga Kader Kampung Distrik Sentani Timur (Olov, Compo dan Martinus) dan kader kampung dari Distrik Momiwaren sebagai co-fasilitator.

Program KOMPAK LANDASAN 2 adalah kerjasama Pemerintah Australia dan Pemerintah Republik Indonesia untuk mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan dasar kesehatan, pendidikan, penanggulangan HIV&AIDS serta tata kelola pemerintah kampung dan catatan sipil di Tanah Papua. ●



**Pelatihan
Manajemen Puskesmas
Provinsi Papua**

Oleh **N. J. TANGKEPAYUNG**



D

inas Kesehatan Provinsi Papua bekerjasama dengan Program KOMPAK-LANDASAN 2 menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Puskesmas di Balai

Latihan Tenaga Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura.

Pelatihan yang dibuka oleh Kepala Balai Latihan Tenaga Kesehatan Provinsi Papua, Bapak Sopyono, SH.S.Kep, Ns.M.Kes ini berlangsung dari tanggal 6 hingga 15 Februari 2018. Sebanyak 27 orang Kepala Puskesmas beserta staf (12 orang laki-laki dan 15 orang perempuan) yang datang dari Kabupaten Jayapura, Waropen, Nabire, Asmat, Boven Digoel dan Lanny Jaya mengikuti pelatihan ini.

Pelatihan ini menghasilkan tenaga kesehatan di Puskesmas yang mampu melakukan perencanaan dan manajemen serta pelayanan kesehatan dengan pendekatan keluarga di Puskesmas. Peserta pelatihan juga diharapkan

akan memiliki jiwa kepemimpinan dan anti korupsi, memahami manajemen mutu serta mampu mengelola data puskesmas dan keluarga sehat di daerahnya masing-masing.

Pelatihan ditutup secara resmi oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Silwanus Sumule, Sp. OG dengan melepaskan tanda pengenalan peserta pelatihan dan menyerahkan sertifikat tanda kelulusan secara simbolis.

Pelatihan ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui kerjasama bilateral dengan Pemerintah Indonesia untuk peningkatan layanan dasar termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan dasar, HIV&AIDS serta tata kelola pemerintah kampung dan catatan sipil. Kerjasama ini di Provinsi Papua dan Papua barat diimplementasikan melalui Program KOMPAK-LANDASAN 2 bekerjasama dengan Yayasan Bursa Kawasan Timur Indonesia (BaKTI).●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mengetahui tentang Program LANDASAN, dapat menghubungi info@bakti.or.id

Dokter di Pulau :

Pusling ke Cio Dalam

Oleh **RIZKY WAKANO**

“Mendaki gunung lewati lembah,
sungai mengalir indah
ke samudera,
bersama teman bertualang.”

~OST. Ninja Hatori

Tiba-tiba saja saya teringat dengan film kartun semasa saya masih kanak-kanak dulu. Perjalanan ke Desa Cio Dalam sama persis dengan lirik lagu tersebut. Desa Cio

Dalam, Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai adalah satu di antara tujuh desa lain yang berada di ruang lingkup kerja puskesmas saya. Desa Cio Dalam salah satu desa yang sangat sulit dijangkau karena harus melewati gunung, lembah, sungai dan juga laut.

Hari senin pagi, saya, teman-teman dari Nusantara Sehat dan beberapa pegawai puskesmas yang lain bersiap-siap untuk melakukan puskesmas keliling di Desa Cio Dalam. Setelah satu tahun bertugas di Pulau Morotai, baru sekali ini saya benar-benar menginjakkan kaki di desa ini. Dua desa lainnya meskipun sulit dijangkau, namun saya cukup sering berkunjung ke sana.

Sebelum sampai di Cio Dalam, kami harus melewati satu perkampungan kecil di pinggir pantai yang hanya terdiri dari delapan belas



Foto : Rizky Wakano



Foto : Rizky Wulano

rumah saja. Kampung tersebut bernama Loloro. Sebenarnya kami juga akan mengadakan Pusling dan Posyandu di situ juga, namun kami memutuskan untuk kembali saat sore hari saja. Butuh waktu hingga lebih dari satu jam hingga mencapai Loloro dari Desa Wayabula dengan menumpang mobil pick up milik seorang warga Loloro. Sebenarnya tak terlalu jauh, hanya saja jalanan yang berliku - naik turun gunung - juga tak sepenuhnya di aspal, terlebih lagi harus melewati beberapa sungai yang airnya tak surut membuat perjalanan kami agak terhambat.

Sampai di Loloro, kami masih harus melanjutkan perjalanan beberapa kilometer lagi hingga tiba di ujung jalan setapak buntu yang ditutupi oleh semak belukar sehingga kami harus turun dari mobil dan berjalan kaki sejauh kira-kira satu kilometer memutar menyusuri pinggir pantai untuk kembali ke jalan utama yang juga ditumbuhi oleh rumput-rumput liar yang menjalar menutupi sebagian besar jalan setapak tersebut.

Setelah berjalan menyusuri pantai dan kembali ke jalan utama, saya terperangah memandang tanjakan yang semakin naik dan tinggi. Sudah hampir pukul dua siang, matahari

berada tepat di atas kepala dan sebagian besar anggota rombongan kami tengah berpuasa - termasuk saya. "Dok, serius ini kita mau jalan kaki naik gunung?" tanya Abi salah satu teman dari Nusantara Sehat. Glek. Saya menelan ludah dan memandang ke atas. Lalu mengalihkan pandangan ke arah rombongan kami yang lain. Masing-masing dari kami menggotong kardus-kardus Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI), kardus besar berisi obat-obatan, timbangan bayi, termos berisi vaksin, satu kardus air mineral dan satu kantong plastik berisi nasi bungkus untuk bekal kami.

"Tadi kata om yang nganter gak terlalu jauh, Bi. Melewati satu tanjakan ini saja." Jawab saya tak yakin.

"Masih jauh, Dok. Bukan cuma tanjakan ini saja. Mungkin ada lima kilometer lagi. Habis ini masih harus nyebrang sungai lagi. Kita su tara sanggup. Tunggu ojek saja sudah", ujar Kak Hamid yang memang sudah beberapa kali ke sana. Wait, memangnya ada ojek yang lewat di tengah hutan antah-berantah kayak gini?

Belum sempat saya menyuarakan isi pikiran saya itu, terdengar deru motor dari kejauhan. Ah, ternyata saat di pinggir pantai tadi ada

sedikit sinyal yang dipakai Jannah untuk menelepon ibu kepala desa agar kami bisa dijemput di sini. Saya menghela napas lega, meskipun hanya ada dua motor yang dipakai bergantian menjemput kami, setidaknya kami tak perlu berjalan mendaki sejauh lima kilometer lagi.

Saya berinisiatif berjalan perlahan sambil menunggu giliran untuk diantar. Tak ada tempat berteduh, yang ada hanya semak belukar. Pepohonan tumbuh jauh dari jalanan yang bersemak. Ah, ternyata saya sok kuat. Belum juga lima belas menit, saya sudah tak sanggup. Tanjakan dengan kemiringan hampir empat puluh lima derajat itu benar-benar menguras tenaga saya. “Dok, torang istirahat di situ sudah. Nanti puasanya gak kuat.” Tiwi menunjuk satu pohon yang lumayan membuat sekitarnya tak langsung terpapar sinar matahari. Saya hanya bisa mengangguk dan mengumpulkan tenaga yang tersisa untuk bisa sesegera mungkin berlindung di bawah satu-satunya pohon yang ada di sana. Jannah langsung merebahkan diri di atas semak-semak - ia tampak tak peduli apakah akan ada ular ataupun sejenisnya di situ. Sayapun demikian, langsung meluruskan kaki dan bersandar di potongan kayu besar yang sudah lapuk. Duh, masih jauhkah perjalanan ini?

Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya tibalah giliran saya untuk diantar ke tepi sungai yang akan kami seberangi. Selama naik motor, saya bergumam sendiri, mana yang katanya cuma satu tanjakan? Ternyata masih ada tiga - eh atau empat - tanjakan yang tingginya sama. Begitu sampai di pinggir sungai, saya agak khawatir melihat perahu yang akan kami tumpangi. Namun untung saja kami bisa menyeberang dengan selamat dan masih harus berjalan kaki sejauh kira-kira dua ratus meter lagi dan akhirnya sampailah kami di Desa Cio Dalam dan langsung disambut dengan hujan deras. Duh, kalau hujan kayak gini, sepertinya kami tak bisa pulang karena air sungai yang banjir. Mobil atau motor pasti tak bisa lewat.

Saya teringat, beberapa waktu lalu ada seorang pasien bayi berumur tiga bulan - berasal dari Cio Dalam - yang saya curigai menderita pneumonia. Saat tiba di puskesmas, hujan tengah turun sangat deras. Bayi tersebut dibalut jaket seadanya, suhu tubuhnya

mencapai hampir empat puluh derajat dan terlihat sangat sesak. Keadaannya sangat memprihatinkan. Saya benar-benar tak bisa membayangkan anak sekecil itu dipaksa menembus hujan dengan mengendarai motor dari desa yang jaraknya jauh dan sangat sulit ditempuh seperti ini. Jadi, begitu meletakkan semua barang bawaan kami di rumah ibu kepala desa, mata saya mulai mencari bayi tersebut di antara bayi-bayi lain yang tengah antri untuk ditimbang dan diimunisasi.

Ah, ketemu. Tak sulit menemukan bayi berambut tebal dengan mata bulat lucu itu. “Bu, bagaimana anaknya? Su sembuh? Kapan keluar dari rumah sakit?”. Saya menghampiri ibu tersebut. “Iya, Dok. Su lama keluar. Su sembuh.” Saya menarik napas lega sembari berpikir, meskipun desa ini sangat sulit dijangkau dan juga jauh dari fasilitas kesehatan, kenapa ya mereka masih betah tinggal di sini? Ah, sumber pencaharian mereka di sini. Jika tak berkebud di sini, bagaimana cara mereka bertahan hidup? dilema.

Hampir setengah enam sore, semua kegiatan dari posyandu, pemeriksaan kesehatan umum, penyuluhan dan juga pemeriksaan ibu hamil telah selesai kami laksanakan. Hujanpun telah berhenti. Menurut Kak Hamid, kami tak akan sempat melakukan posyandu dan pusling di Loloro jika melewati jalan darat lagi, jadi mau tak mau kami harus menaiki perahu mengikuti sungai hingga keluar di laut sampai di Loloro. Saya bergidik ngeri. Pertemuan antara muara sungai dan laut ombaknya cukup besar. Jika melihat perahu yang akan kami tumpangi saya merasa tak yakin bisa keluar dari muara.

“Om, kalau tara bisa lewat, torang berhenti di sini saja sudah. Jalan kaki saja ikut jalur pantai.” Saya menatap ombak yang bergulung dan kemudian pecah memukul air sungai. Wajah Kak Cos yang duduk berhadapan dengan saya sudah pucat pasi, lipstik merah menyala yang ia kenakan tadi sudah habis tak berwarna. Tiwi dan Jannah tak henti berkamat-kamit membaca doa. Kak Hamid dan Eri yang duduk di belakang saya tak dapat saya lihat bagaimana keadaannya. Abi memeluk erat lengan saya, ketakutan. Saya memeluk erat tas ransel yang berisi kamera mirrorless yang baru saja saya beli, stetoskop dan telepon genggam. Konyol memang, tapi saya bertekad, pokoknya kalau

perahu ini terbalik karena dihantam ombak, ransel ini harus saya selamatkan lebih dulu.

Untung saja yang saya takutkan tak terjadi. Entah bagaimana caranya dan setelah berteriak histeris berkali-kali, akhirnya kami bisa melewati muara dan masuk di lautan bebas.

Saya pikir kami sudah selamat dari kemungkinan perahu yang tenggelam, namun begitu mendekati bibir pantai Loloro, rasanya perut saya kembali melilit. Ombak di sini jauh lebih besar daripada di muara sungai tadi. Bahkan rasa-rasanya bisa dipakai untuk berselancar. Bagaimana caranya perahu kami bisa bersandar dengan ombak yang saling berkejaran dan demikian besarnya?

Kira-kira lebih dari lima kali perahu kayu kami berputar-putar di sekitar bibir pantai Loloro, mencari celah di antara ombak untuk bisa masuk ke tepi pantai. Apalagi ketika perahu kami belum sempat memutar dan miring hampir terbalik dihantam ombak. Di tepi pantai terlihat beberapa warga Loloro yang melambai-lambaikan tangan berusaha memandu motoris kami untuk bisa sampai di sana.

“Jangan ada yang bernapas.” Seru om motoris yang membawa perahu itu. Entahlah dia bercanda atau tidak, tapi saya benar-benar menahan napas karena tegang. Tiba-tiba perahu melaju dengan cepat dan setelah menghindari ombak beberapa kali, ujung perahu kami menyentuh pasir pantai yang langsung disambut dan ditarik dengan cepat oleh para pemuda kampung Loloro sebelum perahu disapu ombak lagi. Saya segera melompat keluar dari perahu. Ah, akhirnya bisa menyentuh daratan lagi. Meskipun saya pandai berenang, tapi dengan keadaan yang seperti tadi, rasanya kemampuan berenang saya bisa hilang karena panik.

Saya memandang ombak yang bergulung. Berpikir, bagaimana caranya kedua bapak yang mengantar kami ke sini bisa kembali ke Desa Cio Dalam jika begini keadaan ombaknya? Namun, ternyata kekhawatiran saya itu tak beralasan. Dengan gagah berani dua orang tersebut kembali menaiki perahu kayunya dan langsung saja menghantam ombak yang menerjang. Perahu mereka melompat dan terbanting dengan keras, namun tak terjadi apa-apa. Mulut saya terbuka lebar, kaget. Astaga, mereka pikir perahu mereka itu papan selancar? Bisa

dipastikan jika begitu cara mereka mengendarai perahu saat kami masih menumpang di atasnya, pasti kami telah jatuh di atas laut. Bukan karena perahu yang terbalik, tapi karena terlempar. Hahaha...!

Mungkin karena penduduk di kampung Loloro tak begitu banyak, kegiatan kami selesai hanya dalam waktu satu jam saja. Ternyata ambulans puskesmas kami telah menjemput. Kak Samsir - supir Puskesmas kami - menyuruh kami untuk segera berkemas, karena sungai yang akan kami lewati airnya meluap hingga setinggi pinggang orang dewasa, jika kami menunggu lebih lama lagi, dikhawatirkan luapan airnya akan semakin dalam dan ambulans kami tak bisa melewatinya.

Sudah lewat pukul sembilan malam ambulans kami tiba di puskesmas. Setelah hampir terjun bebas dari tebing dengan ambulans dua kali dan juga hampir tenggelam karena ombak yang besar di laut, akhirnya kami bisa pulang dengan selamat. Tubuh saya rasanya sudah remuk tak karuan dan baju sudah menempel basah di kulit. Sungguh hari ini tak akan pernah saya lupakan. Meskipun banyak kejadian yang seharusnya membuat saya kapok, tapi saya justru ingin kembali ke sana lagi. Semoga saja warga Desa Cio Dalam selau sehat walafiat.

Duh, jadi pengen nyanyi lagu Balada Dokter Kontrak. “Di desa dan di kota, bagiku sama saja, walaupun di tengah malam, bagiku tugas tetap kujalankan.” ●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari www.dokterkiky.com/dokter-di-pulau-pusling-ke-cio-dalam/. Penulis dapat dihubungi : rizkywakano14@gmail.com



Orang-Orang Nusantara di Negeri Seribu Bakau



Oleh **WEANDARA ADAR**



Foto : Weandara Adjar

D

ari Kota Serui Kabupaten Yapen Kepulauan, saya melanjutkan perjalanan ke Desa Rorisi Distrik Urei Faisei Kabupaten Waropen. Menuju kesini salah satu alternatif

transportasi yang tersedia adalah kapal cepat Express Bahari yang berada dalam manajemen PT. PELNI. Kapal Express Bahari melayani rute

Serui-Waropen-Biak pulang pergi setiap harinya dengan biaya 240 ribu rupiah untuk rute Serui-Waropen dan 470 ribu rupiah untuk rute Waropen-Biak. Pukul 11 siang adalah jadwal pemberangkatan kapal dari Serui menuju Waropen. Pembelian tiket dapat dilakukan di dermaga kota. Untuk hari-hari libur disarankan untuk datang lebih awal agar calon penumpang tidak terjebak antrian panjang.



Foto : Weandara Adar

Dengan waktu tempuh 1 jam lebih, kapal Express Bahari melaju membelah birunya laut. Gugusan pulau-pulau kecil nampak mempesona. Di kejauhan nampak samar nelayan yang sedang beraktifitas menangkap ikan. Gelombang kecil ombak, membuat kapal ini oleng kiri dan kanan. Angin mulai terasa membelai tubuh, pertanda kapal mulai melaju dengan kecepatan tinggi. Kurebahkan kepala di kursi, memejamkan mata sejenak, menghimpun kembali tenaga untuk kunjungan selanjutnya.

Pukul 12.28 waktu setempat, kapal merapat di Pelabuhan Waren. Angkutan darat berupa ojek berdesak-desakan menawarkan jasanya. Satu hal yang penting dan perlu anda ingat baik-baik adalah ketika anda ditawarkan ojek di daerah ini (saya rasa juga berlaku untuk daerah-daerah lainnya) anda harus menyebutkan alamat tujuan yang jelas dan menanyakan ongkosnya saat itu juga agar tidak terjadi kesalah-pahaman nantinya. Untuk saat ini saya akan menuju ke daerah Nonomi Distrik Urei Faisei dengan biaya ojek Rp. 15.000. Berdasarkan rekomendasi teman di Serui, di Nonomi ada penginapan yang bisa saya tempati untuk sementara dengan biaya nginap Rp. 150.000 per hari. Keluar dari pelabuhan saya disambut dengan spanduk bertuliskan “Selamat Datang Di Waropen Negeri Seribu Bakau”. Ada keingintahuan yang mendalam terlintas di pikiran saya, namun saat

ini rasa lapar dan gantuk lebih besar ketimbang rasa penasaran dan saya masih memiliki waktu 2 hari untuk membuktikan kebenaran spanduk tersebut. Jadi langkah terbaik saat ini adalah secepat mungkin menuju penginapan, makan siang dan beristirahat.

Air Ampuhan

Distrik Urei Faisei adalah satu dari 6 distrik yang ada di Kabupaten Waropen. Kabupaten Waropen di Provinsi Papua ini dibentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Yapen Waropen pada tahun 2003. Kota Botawa adalah ibu kota dari kabupaten ini. berdasarkan keterangan dari penduduk kata Waropen memiliki makna orang yang berasal dari daerah pedalaman. Berdasarkan mitos yang berkembang di masyarakat, orang-orang Waropen dulunya berasal dari daerah pedalaman (Gunung Tonater, Wamusopedai) akibat adanya air bah (masyarakat menyebutnya air ampuhan) orang-orang ini hanyut hingga ke daerah pesisir Waropen Ambumi dan Roon di Kabupaten Nabire dan Manokwari di sebelah barat dan Waropen Ronari di sebelah timur.

Orang-orang Nusantara

Distrik Urei faisei disingkat Urfas memiliki 12 desa salah satunya Desa Rorisi. Berdasarkan penuturan kepala desa nama Rorisi diambil dari nama roh penjaga kawasan ini konon roh ini



Foto : Weandara Adar

memiliki kekuatan untuk berubah wujud, seperti berubah wujud menjadi binatang ataupun menjadi manusia dengan paras yang cantik atau tampan. Di desa ini terdapat pasar distrik yang lumayan besar. Rata-rata pedagang di sini berasal dari wilayah Sulawesi seperti Makassar, Bugis, Toraja, Manado, Buton, dan Jawa. Ada juga yang berasal dari Sumatera tetapi jumlahnya tidak sebanyak pendatang dari Sulawesi dan Jawa. Masyarakat pendatang ini rata-rata bermukim di sekitar pasar dan hidup dengan berdagang kain, barang-barang sembako, membuka warung makan dan lain-lain. Masyarakat asli Waropen menyebut orang-orang pendatang ini dengan sebutan orang-orang Nusantara. Sejak kapan penyebutan itu berawal dan apakah orang-orang Papua pada umumnya juga menyebut orang-orang pendatang itu sebagai orang-orang Nusantara? Sepertinya butuh kajian yang lebih dalam. Namun jika iya, maka ini adalah suatu kondisi yang menegaskan bahwa Papua pada masa lampau tidak memiliki akses yang cukup dalam aktivitas Nusantara sehingga tidak merasa bagian dari Nusantara.

Potensi Terpendam

Infrastruktur di distrik ini masih sangat minim jalan di ibu Kota Kabupaten yang membelah distrik ini juga masih jauh dari kata layak. Masih banyak yang harus diperbaiki. Masyarakat di Distrik Urfas kebanyakan mengeluh masalah debu. Kondisi ini akan

semakin parah jika memasuki musim kemarau panjang, debu beterbangan hingga mengganggu warga yang bermukim di pinggir jalan. Bagian pesisir dari wilayah ini cukup elok, namun pemerintah belum mengelolanya dengan maksimal. Saya rasa jika pengembangan pariwisata bisa berfokus ke daerah pesisir dari wilayah Waropen mungkin akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara khusus dan pendapatan daerah secara umum. Spanduk yang bertuliskan “Selamat datang di Negeri Bakau” memang bukan isapan jempol semata. Sepanjang wilayah pesisir kabupaten ini ditumbuhi hutan Bakau yang sangat lebat. Kelebihan ini sebaiknya dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai salah satu sumber pendapatan tentunya dengan didukung oleh *stakeholder* terkait. Ekowisata-*tracking mangrove* misalnya, adalah satu dari beberapa contoh pemanfaatan ekosistem ini. Lainnya, seperti *home industry* panganan yang berbahan dasar magrove, seperti dodol buah bakau, sirup buah bakau dan berbagai olahan bakau lainnya●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis dapat dihubungi melalui email weandaraadar@gmail.com



Foto : Tim PASIKOLA

Pasikola

Bukan Sekadar Angkutan Antar Jemput Anak Sekolah

“Kak, kenapa ji Dafa yang difoto depan mobil? Baru kita tidak. Tidak adil na deh” protes Farhan pada pendamping yang diikuti teman-teman lainnya.

Oleh **MANSYUR RAHIM**

F

arhan dan sebelas anak lainnya adalah siswa-siswa yang bersekolah di kompleks SDN Sudirman. Kompleks sekolah ini sendiri terdiri dari empat sekolah; SDN Sudirman 1, SDN Sudirman 2, SDN Sudirman 3 dan SDN Sudirman 4. Farhan dan teman-temannya yang protes ini merupakan siswa pengguna armada unit 9 yang dikemudikan oleh Darwis. M.

Dafa Ma'rifat, siswa kelas II A SDN Sudirman 2, yang kami foto di depan armada unit 9 sendiri tercatat sebagai pengguna armada unit 6. Kami meminta Dafa berfoto di depan armada unit 9

bukan tanpa alasan, gambar yang menghiasi unit 9 adalah karya Dafa. Sebelum memasuki Pilotage 1.5 kami meminta siswa-siswi pengguna layanan Pasikola untuk menggambar dan gambar Dafa kami pilih untuk menghiasi salah satu armada Pasikola.

Sedari awal kami melibatkan siswa-siswa pengguna dalam pemilihan gambar-gambar untuk armada Pasikola. Biasanya kami menanyakan gambar apa mereka inginkan lalu kembali meminta tanggapan mereka tentang gambar *branding* sudah kami buat sebelum kami memasangnya di mobil. Keterlibatan siswa-siswi pengguna ini penting karena merekalah pengguna layanan Pasikola.

“Mobilnya unik dan lucu, anak-anak justru sangat suka. Ih Ma ada mobil keren kata anak-anak. Anak-anak juga bersemangat ikut mobil Pasikola karena bisa bersama teman-temannya di dalam mobil.” Ungkap Ibu Ruth, orang tua Timothy, siswa SMPN 3 Makassar yang menggunakan armada unit 2 bergambar kartun Nemo. Karakter Nemo pada unit 2 ini juga berawal dari gambar-gambar anak sekolah yang kami temui pada saat peluncuran Pasikola dalam acara Makassar City Expo di Anjungan Losari, 22 Mei 2017. Saat itu kami membagikan selebaran kepada siswa siswi yang naik ke atas mobil dan meminta mereka menggambar body mobil pada kertas yang kami bagikan. Hasilnya, sebagian besar dari mereka menggambar dengan tema ikan dan laut. Akhirnya kami memutuskan memilih karakter Nemo pada unit 2.

Aman, nyaman dan tepat waktu. Tiga hal yang menjadi prioritas Pasikola. Rasa aman adalah syarat utama yang diinginkan orang tua. Nyaman, kami harus memastikan semua siswa merasa nyaman berada selama proses pengantaran dan penjemputan, dari rumah ke sekolah dan sekolah ke rumah. Tepat waktu, kami selalu berupaya untuk memastikan anak-anak tidak terlambat masuk sekolah. Ketiga prioritas tersebut adalah keinginan para orang tua yang kami temui saat riset pada masa inkubasi Pasikola.

Riset ini sendiri berlangsung selama Januari hingga Maret 2017. Tim Pasikola turun ke warga menjumpai banyak pihak dan melakukan

wawancara untuk menggali informasi, angkutan anak sekolah yang ideal bagi mereka. Seperti misalnya, Ibu Muspida yang mengungkapkan bahwa interaksi siswa di dalam mobil adalah hal penting “Saya setiap hari kerepotan mengantar anak ke sekolah sehingga sangat berharap adanya transportasi antar jemput anak sekolah yang nantinya dilengkapi fasilitas seperti kipas angin dan tempat duduk nyaman yang model kursinya berhadap – hadapan agar siswa dapat berinteraksi satu sama lain” kata Ibu rumah tangga yang memiliki anak yang bersekolah di SDN Mangkura ini.

Begitu pun dengan Ibu Nurbaya yang kami jumpai di SDN Mangkura, menurut beliau setiap angkutan anak sekolah sebaiknya “tidak usah pakai AC, karena anak kami biasanya berkeringat jadi takutnya bisa sakit kalau kena AC. Sebaiknya pakai kipas angin saja. Trus iuran sebaiknya tidak terlalu mahal, tapi saya tidak keberatan membayar paling tinggi Rp 500,000 untuk fasilitas dan layanan yang lebih baik dari yang sudah ada sekarang”.

Ada pula orang tua siswa yang meminta tersedianya air mineral di dalam mobil, “Anak-anak kan biasanya suka haus karena suka main. Sebaiknya disediakan air minum galon di kendaraan, anak-anak tinggal membawa botol minuman sendiri” harap Ibu Endang yang sedang menunggu anaknya saat kami wawancara.

Bayangan ideal sebuah moda transportasi anak sekolah dari ibu-ibu yang kami jumpai itulah yang kemudian kami tuangkan ketika modifikasi mobil. Petepete konvensional yang mulai tidak populer karena kalah saing oleh mode transportasi daring, diubah menjadi transportasi ramah anak. Berbagai fasilitas demi keamanan dan kenyamanan siswa pengguna kami tambahkan ke dalam mobil. Sebut saja misalnya; penyejuk dan pengharum ruangan, air mineral, teralis pengaman, perpustakaan mini, tabung pemadam kebakaran, tempat sampah dan kotak P3K. Kesemuanya temuan hasil wawancara dan riset yang kami lakukan.

Tak hanya menemui orang tua siswa, kami juga melakukan wawancara pada siswa dan



guru. Siswa dan guru yang kami temui pada umumnya menginginkan layanan antar jemput yang tepat waktu. Menjawab tantangan itu, kami pun belajar pada penyedia layanan serupa yang telah ada. Kami berguru pada Yayasan Ikatan Supir Antar Jemput (YIKSAJ) dan Sekolah Islam Athirah, keduanya memiliki pengalaman puluhan tahun dalam layanan antar jemput anak sekolah. YIKSAJ sendiri melayani antar jemput pada kompleks SDN Mangkura.

Kami menginginkan Pasikola bukan sekadar layanan antar jemput anak sekolah tapi juga sekolah bagi para pengemudi kami. Dari sepuluh pengemudi yang beroperasi sekarang, hanya ada satu dua yang memiliki latar pendidikan se tingkat sekolah lanjutan atas. Selebihnya tamatan SD dan SMP, bahkan ada yang tak pandai baca tulis dan gagap teknologi. Menjadi tantangan tersendiri bagaimana membuat mereka mampu melakukan komunikasi tertulis ke orang tua melalui aplikasi percakapan Whatsapp dan juga

menjalankan aplikasi Pasikola yang telah dibangun.

Juga, bagaimana menanamkan pentingnya nilai-nilai pelayanan mengingat selama ini pengemudi petepete dikenal sebagai pengemudi yang ugal-ugalan dan semaunya. Tak mudah mengubah kebiasaan mereka yang telah mereka lakukan selama belasan hingga puluhan tahun. Contoh kecil saja, misalnya mereka tak terbiasa turun dari mobil kemudian membukakan dan menutup pintu saat penumpang turun.

Dua hal di atas adalah hal yang tak mudah, namun kami (tim dan para pengemudi) harus melalui proses pembelajaran tersebut. Saat ini ada 10 Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat untuk menjamin layanan Pasikola bisa memenuhi gambaran ideal layanan antar jemput anak sekolah yaitu aman, nyaman dan tepat waktu.

Salah satu orang tua siswa mengungkapkan “Pelayanan sangat memuaskan terutama penjemputan tepat waktu. Sopir baik dan



sopan, serta fasilitas informasi yang update untuk kontrol anak” tutur Marzuki Machmud, ayah dari Muh. Jibril Gibran, siswa SDN Sudirman yang menjadi pengguna layanan. Pasikola pada awalnya dirancang untuk mengurai kemacetan dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta pengguna kendaraan di bawah umur. Seiring ujicoba berjalan, Piloting 1.1 – 1.5 yang berlangsung Mei 2017 hingga Maret 2018, banyak perkembangan yang menyenangkan hati. Pasikola ternyata membawa dampak positif pada kedisiplinan siswa pengguna. “Sekarang Saya perhatikan Asril jadi lebih mandiri, tidak dikasih bangun mi untuk siap-siap ke sekolah” ungkap ibu Ampellan SH, salah satu orang tua siswa SDN Sudirman III pengguna layanan Pasikola.

Harapan orang tua pada saat riset tentang interaksi anak-anak juga mulai terwujud. Hal ini menjadi nilai tambah dari Pasikola bagi Kaswadi yaitu adanya interaksi antar siswa dalam armada Pasikola selama proses pengantaran dan penjemputan. “Siswa yang

tadinya introvert atau sulit bergaul, dengan adanya Pasikola ini bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, minimal yang dalam satu mobil itu” jelas Kepala Sekolah SMPN 3 Makassar. Selain itu, menurut beliau, anak-anak jadi terdidik untuk lebih disiplin dan saling menghargai satu sama lain.

Bagaimana Selanjutnya?

Sejak awal ketika ide Pasikola muncul pada workshop transportasi publik November 2016 Pasikola diharapkan menjadi salah satu jawaban untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mengurai kemacetan di Makassar. Tentu saja hal ini hanya bisa tercapai jika melibatkan banyak pihak. Mulai dari Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Perhubungan Makassar, Organda, Dinas Pendidikan, Pihak Sekolah dan pihak-pihak lain yang bisa memberi sumbangsih.

Untuk menjamin keberlangsungan program, selama masa ujicoba Dinas Perhubungan selaku leading sector telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan banyak pihak terkait dengan umbrella act atau payung hukum bagi jalannya Pasikola. Setelah melalui beberapa kali pertemuan, lahirlah rancangan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Antar Jemput Pasikola. Rancangan Perwali ini telah melalui setidaknya enam kali revisi kemudian uji publik pada tanggal 30 Januari 2018 sebelum disahkan oleh walikota Makassar pada awal Februari 2018.

Dengan adanya Perwali ini, ke depan setelah masa ujicoba selesai pada akhir Maret 2018, pengelolaan Pasikola akan dialihkan ke Dinas Perhubungan Kota Makassar sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana fungsi eksekutif penanggung jawab bidang transportasi. ●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Program Manager PASIKOLA. Dapat dihubungi melalui email info@bakti.or.id



Melindungi Anak Melalui Pencatatan Kelahiran

Oleh **HAMSAH SINRING**

“Sampai Desember 2017 cakupan akte kelahiran anak usia 0 – 18 tahun di Kabupaten Gowa telah mencapai 90,07%. Kerja keras kami telah membuahkan hasil. Kami bersyukur, hasil ini melampaui target awal kami hanya 90% pada tahun 2019”

Ambo, SH., MH, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa

S

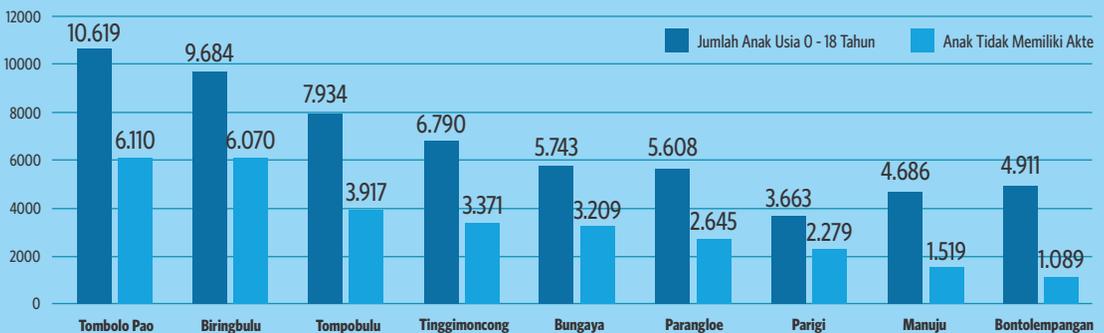
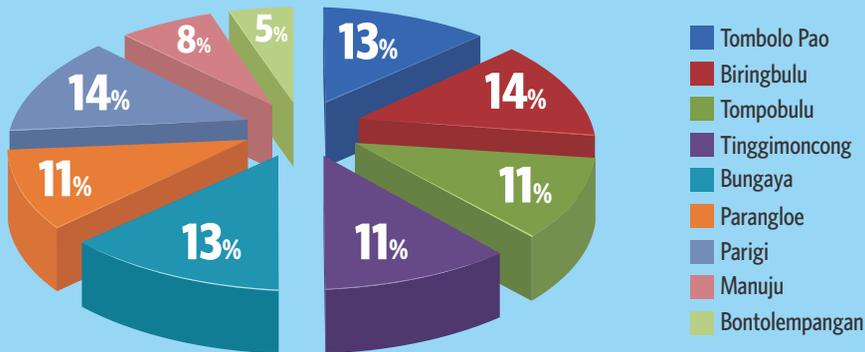
semua berawal dari data dan analisis masalah. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Gowa kemudian memetakan dua kelompok anak yang berpotensi tidak

memiliki identitas hukum atau identitas sipil kependudukan. Tidak hanya itu, mereka juga berpotensi tidak menerima hak perlindungan dan kesejahteraan sosial karena tidak memiliki akte kelahiran. Demikian Edy Sucipto, Sekretaris Dukcapil Gowa menguraikan.

Kelompok pertama adalah anak yang lahir dan tinggal di pelosok terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Kelompok yang kedua mencakup anak dengan disabilitas, anak tidak sekolah, anak bekerja, anak penderita penyakit tertentu, anak terpapar NAPZA, anak diasuh oleh nenek atau kakek karena ditinggalkan orangtuanya, dan anak rentan

Persentase Anak Tanpa Akte Kelahiran di Dataran Tinggi Gowa

(Sumber: Dukcapil Gowa-Oktober 2017)



lainnya yang mungkin berada di perkotaan maupun perdesaan namun terabaikan karena mereka dan keluarganya tidak tercatat secara kependudukan.

Terdapat sekitar 30.209 anak usia 0-18 tahun di dataran tinggi Kabupaten Gowa yang belum memiliki akta kelahiran pada Oktober 2017 dan 1.492 anak dengan disabilitas dan anak dari kelompok rentan lainnya yang belum mendapatkan akta kelahiran. Tanpa akta kelahiran, anak-anak ini sulit mendapatkan pelayanan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial termasuk kesulitan akses jaminan biaya pendidikan dan kesehatan, dan ketika dewasa nanti kesulitan melamar kerja serta mendapat hak sipil lainnya seperti KTP, SIM, paspor, dan sebagainya. (Sumber: Data Dukcapil Kabupaten Gowa)

Anak-anak yang sulit terjangkau upaya pencatatan kelahiran teridentifikasi berada di sembilan kecamatan, sebagian besar di daerah pegunungan dan dataran tinggi Kecamatan

Tombolo Pao, Biringbulu, Tompobulu, Tinggimoncong, Bungaya, Parangloe, Parigi, Manuju, dan Bontolempangan. Sulitnya akses jalan dan lokasi yang jauh (140 kilometer dari ibukota kabupaten) memicu tingginya biaya yang diperlukan warga mengurus administrasi kependudukan, termasuk pencatatan kelahiran di Kantor Dukcapil. Sementara itu kelompok anak rentan menyebar di 18 kecamatan di Gowa, baik di dataran tinggi, rendah, maupun di ibukota kabupaten.

Mengembangkan Kebijakan Strategis

Dalam periode Agustus-Desember 2017 Dukcapil Gowa berhasil mengatasi kesenjangan layanan pencatatan kelahiran anak dengan menjangkau kantong-kantong kelompok anak di atas. Hasilnya,

Capaian cakupan akte kelahiran meningkat sangat signifikan yakni dari 52,32% menjadi 90,07% dalam lima bulan (Agustus-Desember 2017). Pencapaian itu telah melampaui target

Jumlah Anak yang Usia 0 - 18 Tahun yang Memiliki Akte Kelahiran

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Gowa 2017



awal yaitu 90% untuk anak usia 0-18 tahun pada tahun 2019.

Berikut ini kebijakan strategis yang dilakukan oleh Dukcapil untuk mencapai hasil tersebut:

1. Kerja Sama antar OPD

Dukcapil mengembangkan kerja sama antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk mendukung upaya meningkatkan cakupan akte kelahiran. Hingga Desember 2017 terdapat lima Perjanjian Kerja Sama (PKS) yakni PKS antara Dinas Dukcapil dengan Dinas Kesehatan (rumah sakit dan Puskesmas), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP-KB), Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan.

PKS ditandatangani oleh masing-masing pimpinan OPD yang mengatur mekanisme antara lain: pencatatan administrasi kelahiran oleh petugas dan bidan bersalin di rumah sakit dan puskesmas; pengumpulan dan pengantaran data kelahiran oleh Kader dan Penyuluh KB ke petugas Dukcapil; Layanan khusus penerimaan dan pengumpulan data kelahiran oleh Dinas Sosial; serta Pemberdayaan tim operator Dapodikdas (Data Pokok Pendidikan Dasar) dalam menginput data kelahiran siswa dan mengirimkannya ke Dukcapil via online.

PKS yang sudah berjalan berhasil mengaktifkan jajaran petugas garis depan (frontliner) atau yang paling dekat dengan warga masyarakat. Khusus di daerah pedesaan yang terpencil; Kader dan Penyuluh KB dari Dinas PPKB dan petugas frontliner Dinas Sosial

berperan aktif mengumpulkan dokumen kelahiran dan selanjutnya menyerahkan ke Dinas Dukcapil.

Selain melalui jalur PKS, Dukcapil Gowa juga mengembangkan kemitraan dengan kepolisian di tingkat kecamatan dan desa dalam kegiatan pengumpulan data kelahiran sekaligus penyerahan akte kelahiran. Melalui kemitraan ini, sangat membantu anak dalam memperoleh akte kelahiran.

Sementara itu, untuk melacak data kelahiran dalam kelompok anak rentan, Dukcapil aktif bersinergi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam perlindungan anak rentan seperti Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Gowa, Persatuan Mandiri Kusta (PERMATA) Gowa, Panti Sosial, dan sejumlah organisasi peduli anak lainnya. Untuk layanan anak dengan disabilitas, Dukcapil juga melaksanakan program pencatatan dan penerbitan akte kelahiran langsung di tempat tinggal mereka.

2. Layanan Pencatatan Kelahiran Online

Dukcapil Gowa, selain menyediakan layanan pencetakan akta kelahiran langsung secara *online*, juga mengembangkan kemitraan dengan Dinas Infokom, penyedia jaringan publik di daerah itu. Tujuannya adalah menyediakan layanan permohonan akte kelahiran *online*. Layanan *online* tersebut diakses melalui link dalam situs disdukcapil.gowakab.go.id, situs resmi Dinas Dukcapil Gowa. Layanan *online* tersebut tidak

Usia /Status Anak	Titik Penjangkauan
Usia 0 tahun	Tempat bersalin
Usia 0 - 5 tahun	Faskes Posyandu
Usia 4 - 6 tahun	PAUD, TK/RA
Usia 6 - 12 tahun	SD/MI
Usia 12 - 15 tahun	SMP/MTs
Usia 15 - 18 tahun	SMU, SMK, dan MA
Anak terlantar/PMKS	Panti Sosial
Anak berhadapan hukum	Institusi/fasilitator di mana anak berada
Anak penyandang disabilitas	Organisasi / lembaga/fasilitator anak disabilitas
Anak WNI di luar negeri tanpa dokumen	Institusi/fasilitator di mana anak berada

mencetak akte kelahiran melainkan memfasilitasi warga agar lebih memudahkan warga mengirimkan data kelahiran ke Dinas Dukcapil.

Permohonan akte kelahiran *online* ini, lebih mengutamakan institusi atau lembaga yang memiliki tenaga operator, seperti operator sekolah di SD dan SMP. Tujuannya, agar permohonan secara kolektif dilakukan oleh sekolah.

Caranya cukup sederhana, kantor Dukcapil memberikan *username* dan *password* setiap sekolah. Setelah itu operator sekolah mengakses link/tautan dan memasukkan informasi data kelahiran siswanya yang belum punya akte kelahiran ke dalam *form* yang telah disediakan. Selanjutnya mengirimkan ke Dukcapil untuk diverifikasi. Jika verifikasi sudah dinyatakan disetujui, petugas Dukcapil langsung mengirimkan resi permohonan kepada pemohon untuk pengambilan akte kelahiran di kantor Dukcapil. Jika permohonan secara kolektif, maka pihak Dukcapil akan mengantarkan akte kelahiran langsung ke alamat pemohon.

Khusus untuk operator sekolah, Dukcapil telah melakukan sosialisasi pemanfaatan layanan online tersebut. “Kemitraan kami dengan Dinas Pendidikan, operator sekolah, sangat penting. Tujuannya untuk mengatasi keterlambatan pencatatan kelahiran siswa akibat berbagai kendala dari orang tua siswa, mencegah adanya penulisan nama yang berbeda dalam ijazah dan akte kelahiran, dan

kesalahan nama orang tua siswa”, papar Edy Sucipto.

3. Mendekatkan Layanan Kepada Anak

Dukcapil juga menjangkau titik-titik yang menjangkau jalur pendidikan (sekolah), kesehatan (Rumah Sakit), lembaga atau organisasi sosial, dan masyarakat. Strateginya, dengan cara melakukan pengelompokan titik-titik target jangkauan seperti di bawah:

Selain menerapkan kebijakan strategis di atas, Dukcapil Gowa juga melakukan konsolidasi teknis seperti pengintegrasian Data Akte Kelahiran dari Non SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) ke dalam SIAK dengan mengutamakan tahun terbaru sampai dengan tahun 1999 serta pembaruan data anak yang belum punya akte kelahiran berbasis data RT.

Keberhasilan Pemerintah Gowa mencapai 90,07% cakupan akte kelahiran dalam tahun 2017, melampaui target RPJMN 2015 – 2019 yakni 85% pada tahun 2019. Kerja keras ini patut diapresiasi dan dibanggakan. Namun, untuk mencapai 100% masih ada sekitar 24.949 anak (Dukcapil Gowa per Desember 2017) yang harus dipastikan tercatat kelahirannya agar hak layanan kesejahteraan sosial mereka terpenuhi ●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Program Officer BaKTI - UNICEF dapat dihubungi melalui email info@bakti.or.id



Reses Partisipatif di Maros

Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**

P

ada akhir Februari hingga awal Maret 2018 anggota DPRD Kabupaten Maros melaksanakan Reses Masa Sidang Kedua 2017-2018. Penulis

mengikuti tiga anggota DPRD yang melakukan Reses dengan menggunakan metode Reses Partisipatif, yaitu Chaidir Syam, Haeriah Rahman, dan Fitriani Syamsuar.

Berbeda dengan Reses sebelumnya yang menggunakan metode satu arah atau sangat konvensional, dimana anggota menjadi aktor utama dalam Reses, maka pada Reses Partisipatif menempatkan peserta Reses atau konstituen sebagai subyek. Reses Partisipatif adalah Reses yang menggunakan metode partisipatif dan berperspektif gender. Reses Partisipatif dikembangkan oleh Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) melalui Yayasan BaKTI.

Ada tiga faktor yang harus dipenuhi dalam Reses Partisipatif yaitu: (1) metode, pelaksanaan Reses dilakukan dengan menggunakan metode diskusi kelompok atau diskusi kelompok terfokus; (2) peserta, peserta Reses terdiri dari seluruh unsur di dalam masyarakat, perhatian khusus diberikan kepada masyarakat miskin, perempuan miskin, perempuan, anak, penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan masyarakat marjinal lainnya; dan (3) tempat, diupayakan agar pelaksanaan Reses tidak menggunakan tempat-tempat resmi dan formal, seperti kantor pemerintah. Jika harus menggunakan kantor pemerintah, maka dipastikan masyarakat miskin dan kelompok minoritas dapat hadir dan berpartisipasi.

Reses dan Perencanaan Pembangunan

Salah satu tujuan pokok Reses adalah anggota DPRD menerima atau menjangar aspirasi konstituen di Daerah Pemilihan. Pada tujuan ini, Reses adalah bagian dari perencanaan pembangunan. Hasil Reses



Foto: M. Ghufiran H. Kordik K./Nayasan BaKTI

merupakan aspirasi atau usulan konstituen yang akan diperjuangkan oleh anggota DPRD sehingga menjadi bagian dari program pembangunan.

Namun pelaksanaan Reses selama ini tidak mampu menjangkau dan menampung aspirasi konstituen. Pasalnya Reses yang dilakukan hanya menghadirkan perwakilan kelompok kecil yang terdiri dari elit dan laki-laki. Penggunaan metode Reses Partisipatif dapat berkontribusi pada perencanaan pembangunan, karena penggunaan metode yang partisipatif dan perwakilan konstituen yang lebih beragam, sehingga memungkinkan usulan kepada anggota DPRD lebih variatif dan sesuai kebutuhan konstituen.

Reses Partisipatif yang dilakukan oleh Chaidir Syam, Ketua DPRD Maros, menghadirkan konstituen yang sangat beragam, termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok anak. Reses difasilitasi oleh staf Sekretariat Dewan (Sekwan) dan dibantu langsung oleh Chaidir

Syam. Sebagai anggota DPRD, Chaidir Syam tidak kikuk saat memfasilitasi diskusi kelompok dan presentasi hasil diskusi.

Reses dan Hak Konstituen

Peserta Reses Partisipatif dibagi ke dalam enam kelompok yaitu kelompok pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, sosial budaya, dan kelompok anak. Diskusi kelompok sangat dinamis karena setiap peserta dapat menyampaikan aspirasinya, yang kemudian direspon oleh peserta yang lain dan terjadinya diskusi secara interaktif. Diskusi kelompok tersebut merupakan hal baru dalam Reses sehingga peserta umumnya aktif dalam menyampaikan aspirasi sekaligus merespon aspirasi peserta lain.

Dengan menggunakan metode diskusi kelompok, setiap peserta mempunyai kesempatan untuk menyampaikan aspirasi atau usulannya. Aspirasi atau usulan dari peserta dapat direspon oleh peserta yang lain, sehingga usulan yang muncul dapat dikritisi dan didiskusikan secara bersama-sama di dalam kelompok.

Diskusi kelompok menjadikan usulan-usulan yang akan disampaikan kepada anggota DPRD telah dikritisi dan terseleksi, karena mendapat respon dan dikritisi oleh konstituen yang lain. Tidak seperti Reses sebelumnya di mana setiap usulan langsung dicatat oleh anggota DPRD, yang kemudian membuatnya pusing karena harus menampung dan membawa apa saja yang diusulkan.

Setiap usulan atau aspirasi juga akan dikritisi oleh kelompok yang lain pada saat presentasi hasil diskusi. Karenanya setiap usulan atau aspirasi dengan sendirinya mengalami proses di konstituen secara matang. Jika usulan yang muncul bukanlah kebutuhan mayoritas, maka dengan sendirinya akan digugurkan oleh konstituen sendiri.

Usulan yang dikritisi atau didiskusikan bersama akan menghasilkan kegiatan atau program yang lebih berkualitas sesuai kebutuhan konstituen, bukan merupakan usulan yang merupakan kepentingan pihak



Foto : M. Ghufan H. Kordi K./Yayasan BaKTI

atau kelompok tertentu. Artinya, usulan konstituen merupakan usulan riil, bukan sekadar usulan yang dicatat dan dibawa oleh anggota DPRD.

Reses Partisipatif tidak sekadar menjembatani hubungan anggota DPRD dengan konstituennya, tetapi memberi ruang kepada konstituen untuk menyampaikan aspirasi kepada wakilnya. Reses Partisipatif dikembangkan untuk memenuhi hak-hak konstituen dalam demokrasi perwakilan. Di pihak lain, Reses Partisipatif berdampak pada peningkatan kapasitas konstituen maupun anggota DPRD.

Konstituen Perempuan

Di tempat yang lain, Haeriah Rahman, salah satu anggota DPRD Maros melakukan Reses Partisipatif secara tematik dengan perempuan. Semua peserta adalah perempuan yang terdiri dari guru-guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), kader posyandu, ibu-ibu pengusaha informal, dan ibu rumah tangga.

Setelah pembukaan, peserta Reses dibagi ke dalam kelompok sesuai kehadiran peserta, yaitu

kelompok guru PAUD, kelompok kader posyandu, kelompok pengusaha informal (pedagang kue dan makanan kecil, penjahit, penjual pulsa dan lain-lain), dan kelompok ibu rumah tangga.

Masing-masing kelompok membuat usulan dan didiskusikan di dalam kelompok, yang selanjutnya dipresentasikan. Usulan atau aspirasi tentu menggambarkan karakteristik peserta, yang memang sesuai dengan kebutuhan konstituen. Dari berbagai usulan terlihat bahwa, tidak usulan yang dibuat-buat, melainkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan.

Konstituen Anak

Sementara Reses Partisipatif yang dilakukan oleh Fitriani menghadirkan konstituen anak-anak dari Sekolah Dasar (SD). Sebagai konstituen, anak-anak adalah kelompok yang mempunyai posisi paling lemah dan rentan. Karena sebagian besar anak bukanlah pemilih dalam pemilihan umum. Namun, anak ada konstituen dalam sebuah Daerah pemilihan (Dapil) yang tidak boleh diabaikan oleh anggota DPRD.



Foto : M. Ghufan H. Kordi K./Yayasan BaKTI

Sebagai anggota DPRD, Fitriani melakukan terobosan, tidak hanya melakukan Reses secara Partisipatif, tetapi juga melakukan Reses dengan konstituen anak-anak. Peserta Reses yang merupakan anak-anak tersebut dibagi ke dalam kelompok-kelompok untuk membuat dan mendiskusikan usulan dan aspirasi mereka.

Sebanyak enam kelompok anak dibentuk untuk berdiskusi kelompok, yang kemudian hasil diskusinya dipresentasikan. Dari diskusi kelompok dan presentasi hasil diskusi yang kesemuanya dilakukan oleh murid-murid SD, siapa pun tersadar bahwa anak-anak pun mempunyai aspirasi yang selama ini tidak pernah disampaikan kepada wakilnya di DPRD. Karena anak-anak tersebut pun tidak pernah tahu siapa yang mewakilnya mereka.

Reses Partisipatif membuka ruang bagi konstituen untuk menyampaikan aspirasi kepada wakilnya, tetapi tidak sekedar aspirasi atau usulan. Melalui proses diskusi, maka usulan-usulan yang disampaikan kepada anggota DPRD tentu lebih berkualitas. Anggota DPRD juga mendapat pembelajaran mengenai proses-proses yang menempatkan konstituen sebagai subyek. Konstituen yang hadir dalam

Reses tidak sekedar memenuhi proses formalitas, tetapi benar-benar menjadi bagian dari proses untuk kepentingan bersama, yaitu membicarakan masalah yang dihadapi dan cara penyelesaiannya.

Reses Partisipatif juga menjadikan pelaksanaan Reses lebih baik, bukan sebagai media anggota DPRD untuk memberikan janji-janji yang sulit dipenuhi. Anggota DPRD harus menjadikan konstituen sebagai kelompok yang berdaya, yang dapat memberikan data dan informasi untuk kepentingan pembangunan. Anggota DPRD juga harus mampu menjelaskan kepada konstituennya mengenai tugas dan fungsinya, sehingga konstituen menjadi paham dan dapat berkontribusi pada peningkatan kinerjanya. ●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mengetahui tentang Program MAMPU BaKTI, dapat menghubungi info@bakti.or.id

Artikel

Program MELAYANI

MELAYANI (Mengurai Permasalahan Perbaikan Layanan Dasar di Indonesia) adalah sebuah program yang mendukung pemerintah daerah untuk menggunakan pendekatan berbasis masalah dalam menanggulangi masalah-masalah layanan dasar dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kapasitas yang dimiliki pemerintah daerah sendiri.

Program MELAYANI, yang didukung oleh Bank Dunia, akan diujicobakan di lokasi-lokasi berikut ini selama satu tahun mulai Oktober 2017 sampai dengan September 2018:

- Belu (Nusa Tenggara Timur), Kubu Raya (Kalimantan Barat), Bojonegoro (Jawa Timur)

Update dan berita MELAYANI dapat mengunjungi tautan : <http://www.batukarinfo.com/melayani>

Sembilan Kunci Untuk Menciptakan SDG Country Platform di Indonesia

Tahukah anda Indonesia adalah negara paling dermawan kedua di dunia, dengan 79 persen orang telah memberikan sumbangan untuk zakat bulan lalu?. Zakat, sebuah sumbangan wajib tahunan berdasarkan hukum Islam, diperkirakan bernilai 16 miliar dolar AS di Indonesia. Ini sepertinya sangat besar, tapi jika setiap orang Muslim yang memenuhi syarat menyumbang 74 dolar setahun, angka itu bisa tercapai. Sekarang, hanya satu persen dari jumlah itu telah dikumpulkan.

Bersama dengan investasi swasta dalam negeri, yang menyumbang hampir separuh dari seluruh pembiayaan di Indonesia, ini merupakan potensi yang sangat besar untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs). Dan ini menjadi pertimbangan utama untuk mengembangkan SDG Country Platform di Indonesia.

Rencana Strategis UNDP 2018-2021 menggagas Country Support Platforms untuk membantu negara-negara merancang dan memberikan solusi terintegrasi untuk SDGs. Platform ini membuka kolaborasi yang lebih luas sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku. [Http://www.batukarinfo.com/komunitas/articles/sembilan-kunci-untuk-menciptakan-sdg-country-platform-di-indonesia](http://www.batukarinfo.com/komunitas/articles/sembilan-kunci-untuk-menciptakan-sdg-country-platform-di-indonesia)

Indonesian internet users reach over 143 million people

Penetration of Indonesian internet users in 2017 reached 143.26 million people or 54.68 percent, an increase compared to 132.7 million people in 2016, a survey conducted by the Association of Indonesian Internet Service Providers (APJII) revealed.

"This number will continue to increase. Next year APJII will provide the live data through big data," APJII secretary general Henri Kasyfi Soemartono said in a statement received by ANTARA on Monday.

Java is still the highest with internet users` concentration of 58.08 percent, followed by Sumatra with 19.09 percent, Kalimantan 7.97 percent, Sulawesi 6.73 percent, Bali-West Nusa Tenggara-East Nusa Tenggara 5.63 percent and Maluku-Papua 2.49 percent.

[Http://www.batukarinfo.com/melayani](http://www.batukarinfo.com/melayani)

Referensi

Survei Ketimpangan Sosial Menurut Persepsi Warga Tahun 2017



Sejak awal tahun 2017, berbagai media massa memberikan tingginya ketimpangan di Indonesia dan termasuk yang terburuk di dunia. Sinyalemen itu sesuai juga dengan apa yang ditemukan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dalam survei ketimpangan sosial menurut persepsi warga, yang diluncurkan di Jakarta pada 8 Februari 2018.

Di tahun 2017, INFID melakukan pengukuran penilaian warga mengenai ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia selama tahun 2016/2017. Hasil survei ini menunjukkan ada kenaikan ketimpangan sosial menurut warga. Indeks ketimpangan yang diperoleh lebih baik dari tahun sebelumnya. Indeks ketimpangan berubah dari 4,4 menjadi 5,6. Artinya setiap warga menilai ada 5-6 ranah yang timpang di Indonesia. Indeks ketimpangan di tahun 2017 tergolong tinggi.

<http://www.batukarinfo.com/referensi/survei-ketimpangan-sosial-menurut-persepsi-warga-tahun-2017>

Batukarinfo.com adalah sebuah portal online yang menyediakan informasi dan pengetahuan tentang beragam program pembangunan di KTI. Media ini dapat dimanfaatkan untuk berinteraksi dan berbagi pengetahuan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Untuk registrasi menjadi member Batukarinfo dan informasi lebih lanjut,

anda dapat menghubungi : www.batukarinfo.com



Kegiatan di BaKTI

7-8 Maret 2018

Workshop Innovation Lab Kota Makassar

Pemerintah Kota Makassar memiliki sejumlah inovasi yang dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebelumnya, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar dan UNDP berdiskusi terkait ide pembentukan Laboratorium Inovasi. Harapannya laboratorium ini menjadi wadah yang bisa merekatkan OPD yang ada di Kota Makassar dalam menggagas inovasi yang berbasis kebutuhan warga. Untuk itulah Workshop awal terkait pembentukan Lab Inovasi dilaksanakan di kantor BaKTI. Kegiatan ini dihadiri oleh 49 peserta di hari pertama (Laki-laki 37 dan Perempuan 20) dan 54 peserta di hari ke dua (laki-laki: 34, perempuan 20). OPD yang hadir diantaranya adalah perwakilan dari Balitbangda, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Diskominfo, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kantor Camat, RSUD, Disnaker, Dinas PU, dan lain-lain.

Selama pelaksanaan kegiatan peserta sangat antusias dengan rencana pemebentukan lab inovasi ini dimana lab ini nantinya akan memfasilitasi diskusi-



diskusi diantara pemangku kepentingan termasuk masyarakat untuk menjadi mitra dalam menyelesaikan tantangan pembangunan. Peserta juga melakukan *stock taking* atau membuat daftar inovasi apa saja yang sedang dijalankan di kota Makassar serta mengidentifikasi gap yang ada saat ini. Di akhir workshop disepakati perlu dirancang dan dibentuk Laboratorium Inovasi dimana dalam prosesnya Badan Penelitian dan Pengembangan kota Makassar akan menjadi *leading sector*. ●



22 Maret 2018

Pertemuan Koordinasi Petugas Frontline PPKAI Kota Makassar dan Kabupaten Gowa

UNICEF melalui Yayasan BaKTI bekerjasama dengan Pemerintah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa menyelenggarakan penguatan kapasitas bagi Sakti Peksos sebagai frontliner Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI) Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, bertempat di ruang pertemuan BaKTI Makassar.

Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI) telah memberikan layanan kepada sejumlah kecil anak-anak dan keluarga. Layanan ini akan mencakup intervensi pencegahan, deteksi dini dan rehabilitasi dengan lebih fokus pada deteksi dini. Untuk mendukung dan memperkuat PPKAI dibutuhkan

keterlibatan aktif instansi terkait, petugas *frontline* yang terdiri dari para pekerja sosial, Sakti Peksos dan *stakeholder* lainnya. Petugas *frontline* yang bekerja dalam program Layanan terpadu Anak Integratif diharapkan mampu melakukan koordinasi secara berkelanjutan dan terpadu, serta melakukan deteksi dini melalui penilaian terhadap anak dengan keluarga rentan secara tepat dan sesuai kode etik.

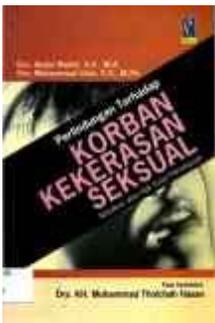
Kegiatan yang diikuti oleh 20 orang peserta (laki-laki 6 orang, perempuan 13 orang) ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Sakti Peksos sebagai petugas *frontline* PPKAI dalam melakukan penilaian anak rentan dan berisiko, beserta keluarganya. Input perbaikan terhadap formulir penilaian yang ada, sehingga format penilaian lebih sederhana dan implementatif. ●



Membangkitkan Kabar Baik (Inspirasi Keadilan Ekonomi dari Indonesia Timur)

PENULIS Oxfam

Buku ini berisi secuplik pengalaman dan pembelajaran Program Keadilan Ekonomi Oxfam bersama mitra-mitranya di tiga wilayah : Papua, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. Buku ini mengajak pembaca dan pemerhati mengikuti perjalanan dan kisah sukses perempuan dan laki-laki di Desa Mbatakapidu dalam memperjuangkan ketahanan pangan di wilayah tandus dalam cerita Geliat Ketahanan Pangan di Tanah Sumba, cerita dari Kepulauan Pangkajene dalam membangun dan mengembangkan kelompok-kelompok petani organik dan rumput laut, serta Kabupaten Jayapura dengan para petani kakao yang melakukan restorasi kakao di tengah desakan pembangunan dan semangat untuk mempertahankan budaya setempat.



Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual

PENULIS Drs. Abdul Wahid SH, MA & Drs. Muhammad Irfan SH, M.Pd

Kekerasan, pelecehan dan eksploitasi seksual merupakan fenomena pahit yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa namun juga menimpa anak-anak perempuan di bawah umur. Berbagai modus kejahatan seksual terhadap perempuan tidak akan putus apabila digambarkan secara grafik, efek jera yang diharapkan dari hukuman atas pelakunya belum kunjung nampak. Namun dengan diangkatnya tema perlindungan atas korban kekerasan seksual dalam buku ini, diharapkan bisa membuka wawasan, pikiran dan mata kita untuk bersama-sama menyisihkan eksistensi fenomena sosial dari tatanan budaya kita.



Mengayuh di Ombak

PENULIS Wahyu Chandra

Buku ini menyajikan beberapa aktivitas dan kehidupan sosial di masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil Sulawesi Selatan sebelum dan setelah adanya upaya pembangunan serta pemberdayaan oleh pemerintah, mulai dari potret budaya, konservasi dan pelestarian sumberdaya maupun pemanfaatan sumberdaya alam yang menunjang ekonomi masyarakat.



Traktat Toleransi

PENULIS Voltaire

Di banyak tempat, perbedaan keyakinan beragama menjadi pemicu terjadinya kekerasan dan pembantaian jiwa manusia. Tak terkecuali pada masa Voltaire hidup. Ketika itu Prancis, yang tengah dipimpin oleh Louis XIV, penuh dengan perselisihan agama, Protestan dan Katolik atau dengan Jansenisme. Terlebih lagi saat itu kekuasaan memiliki hak untuk menyiksa orang-orang karena kepercayaan mereka berbeda dengan kepercayaan penguasa. Traktat Toleransi membangkitkan ingatan kita pada mimpi buruk kekerasan masa lalu akibat tiadanya toleransi beragama.